

**BAB IV**

**EKSISTENSI RUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERDAMAIAN**

**AZERBAIJAN DAN ARMENIA**

**4.1. Rusia Menengahi Gencatan Senjata 2020 di Nagorno- Karabakh**

Gencatan senjata yang ditengahi Rusia, yang dicapai setelah pembicaraan di tingkat menteri luar negeri pada 10 Oktober 2020, dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran untuk memungkinkan pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh dan pasukan Azeri bertukar tawanan dan korban perang. Pembicaraan itu adalah kontak diplomatik pertama antara Azerbaijan dan Armenia sejak pertempuran di daerah kantong pegunungan meletus pada 27 September 2020.<sup>1</sup> Mengingat gencatan senjata tersebut memakan banyak korban jiwa orang Azerbaijan dan warga sipil Armenia, serta merenggut nyawa lebih dari 5.000 personel pertempuran, dan mengakibatkan perpindahan sekitar 70.000 orang Armenia dari Nagorno-Karabakh.

Pengerahan pasukan Rusia ke Azerbaijan patut mendapat perhatian khusus, karena menghadirkan persepsi kemungkinan bahwa itu dapat menyebabkan pembekuan baru dari proses resolusi konflik Nagorno-Karabakh, bukan menyelesaikan konflik itu sendiri secara politis. Inti masalahnya adalah bahwa Moskow harus memutuskan untuk mempertahankan pasukan di tanah Azeri bahkan

---

<sup>1</sup> Serena Giusti&Tomislava Penkova, “*Russia: just a normal great power?*”, *ISPI Working Paper Issue*, [http://www.ispionline.it/it/documents/WP\\_34\\_2008.pdf](http://www.ispionline.it/it/documents/WP_34_2008.pdf) . diakses pada 23 Mei 2022.

setelah lima tahun berakhir ketetapan tugas sebagai penjaga perdamaian, tidak mungkin Azerbaijan bisa mencegah ketetapan seperti itu.

Perjanjian tersebut menetapkan penghentian segera permusuhan bersenjata di sepanjang garis saat ini kontak. Ini mencegah kehancuran total pasukan Armenia yang masih hidup, yang kerugiannya sangat besar. Gencatan senjata memerintahkan pengembalian cepat dari tiga distrik yang diduduki Armenia di sekitar Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan, yang belum telah direbut oleh pasukan Azerbaijan selama perang. Pada saat yang sama, sekitar 70% wilayah bekas Oblast Otonom Nagorno-Karabakh (NKAO) adalah untuk tetap berada di bawah kendali Armenia, seperti yang lainnya telah diambil alih oleh militer Azeri oleh 9 November.<sup>2</sup>

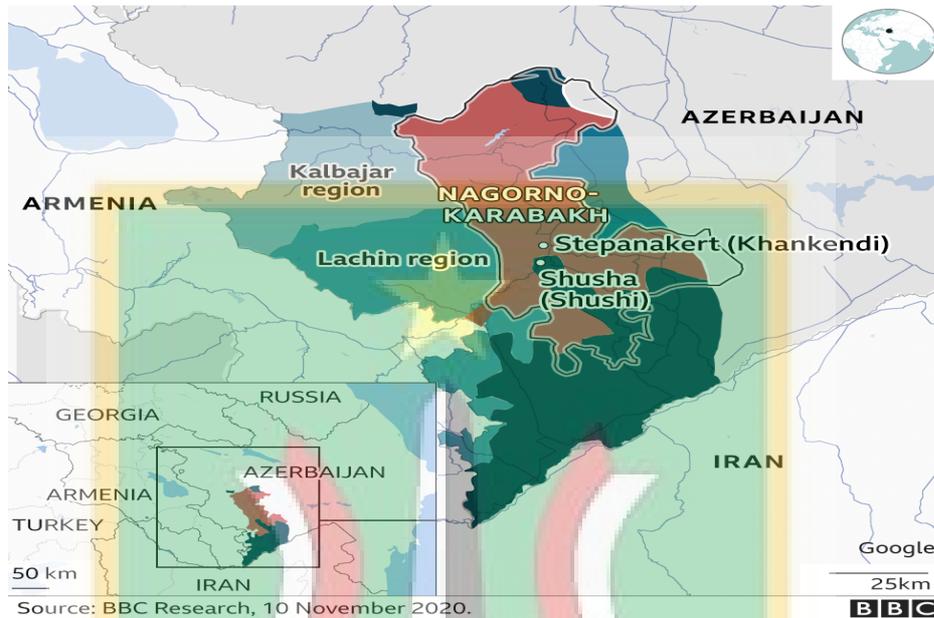
Semua angkatan bersenjata Armenia wajib pergi wilayah Nagorno-Karabakh, dan kontingen penjaga perdamaian Rusia akan dikerahkan untuk memastikan gencatan senjata dan menjamin stabilitas. Penjaga perdamaian Rusia sekarang tidak hanya mengamankan bagian Nagorno-Karabakh yang masih dikuasai oleh Armenia, tetapi juga koridor Lachin, yang kemungkinan akan tetap menjadi satu-satunya, terbuka secara permanen hubungan darat antara Nagorno-Karabakh dan Armenia.

---

<sup>2</sup> Aleksandra Jarosiewicz&Krzysztof Strachota, “Nagorno-Karabakh – unfreezing conflict”, OSW (26 November 2011), <http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2011-10-26/nagorno-karabakh-conflict-unfreezing> . Diakses pada 24 Mei 2022.

### Armenia-Azerbaijan peace deal

- Armenian forces to withdraw by 15 Nov
- Armenian forces to withdraw by 20 Nov
- Armenian forces to withdraw by 1 Dec
- Areas regained by Azerbaijan in the war
- Area of deployment for Russian peacekeepers



Gambar 4.1 (Sumber: BBC Research)

Perjanjian yang mengatur pembentukan koridor darat antara Azerbaijan Barat dan eksklave Nakhichevan melalui wilayah Armenia. Perjanjian gencatan senjata bahkan tidak memuat referensi ke Organisation for Security and Cooperation in Europe(OSCE) atau Minsk Group-nya, meskipun yang terakhir telah bertanggung jawab atas penyelesaian konflik sejak akhir Perang Nagorno-Karabakh pada tahun 1994 dan Rusia adalah salah satu ketua bersamanya.

Fakta bahwa OSCE benar-benar keluar dari perjanjian gencatan senjata merupakan kemunduran besar baik untuk organisasi itu sendiri, dan juga untuk Uni Eropa, sebagai salah satu negara anggota utama UE, Prancis, adalah salah satunya dari ketua bersama Grup Minsk, sedangkan negara anggota lainnya yaitu Jerman,

Italia, Swedia dan Finlandia adalah anggotanya. <sup>3</sup>Turki tidak menjadi penandatangan pihak dalam perjanjian gencatan senjata baik, maupun ketua bersama tambahan dari Grup Minsk, meskipun Baku berulang kali meminta Ankara untuk terlibat dalam gencatan senjata. negosiasi selama perang.

#### **4.1.1. Batasan Rusia Sebagai Penjaga Perdamaian**

Menurut perjanjian gencatan senjata Rusia kontingen penjaga perdamaian terdiri dari maksimal 1.960 personel bersenjata ringan, didukung oleh 90 pengangkut personel lapis baja, serta 380 truk dan kendaraan lainnya. Namun, sudah dari awal operasi sudah jelas bahwa Rusia telah mengerahkan jumlah personel yang jauh lebih besar dengan susunan pasukan yang jauh lebih besar persenjataan dan perlengkapan militer dari yang ditetapkan oleh persetujuan.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan sudah pada 21 November 2020 bahwa penyebaran kontingen penjaga perdamaian telah selesai, termasuk 552 kendaraan militer dan lainnya. Meskipun angka terakhir melebihi angka kendaraan yang disahkan oleh perjanjian gencatan senjata. Jumlah keseluruhan personel di kontingen Rusia melebihi 5.000 orang. Ini termasuk beberapa penasihat, sukarelawan, spesialis lainnya, dan personel Kementerian Situasi Darurat, serta sebagai satuan polisi militer, pegawai Kejaksaan Kantor Jenderal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Annamaria Kiss, "Russia and the South Caucasus: Managing Contradictions", (n.d), [http://www.fakprojekt.hu/docs/EE-4-kotet\\_ch2.pdf](http://www.fakprojekt.hu/docs/EE-4-kotet_ch2.pdf). diakses pada 10 Mei 2022.

<sup>4</sup> Irena Sargsyan, "International Mediation in Theory and Practice: Lesson of Nagorno-Karabakh", Armenian Center for National and International Studies (n.d),

Penjaga perdamaian Rusia juga memiliki membangun barak militer yang mampu menampung lebih banyak orang daripada yang ditentukan kontingen. Elemen yang perlu diperhatikan adalah saat gencatan senjata perjanjian mengatur bahwa penjaga perdamaian Rusia harus dilengkapi hanya dengan senjata kecil seperti yang ditentukan dalam dokumen (so strelkovim oruzhiem).

Senjata yang sudah memenuhi syarat bukan senjata ringan, melainkan senjata ringan yang keberadaannya tidak diizinkan oleh perjanjian gencatan senjata. Menariknya, itu adalah orang Rusia Kementerian Pertahanan sendiri yang telah menerbitkan bukti foto pelanggaran penjaga perdamaian Rusia peraturan gencatan senjata tentang senjata. Kontingen penjaga perdamaian dikomandoi sangat berpengalaman, jenderal bintang tiga, Jenderal Rustam Muradov, mantan wakil komandan Distrik Militer Selatan dan veteran perang di Ukraina dan Suriah.

Ada satu lagi jenderal Rusia yang bertugas di kontingen, Mayor Jenderal Andrey Volkov, yang pada November 2020 bertanggung jawab atas Pusat Antar Departemen untuk Respon Kemanusiaan, yang dibuat oleh Vladimir Putin pada 13 November 2020 dan beroperasi di Stepanakert. Kehadiran dari tiga jenderal di lapangan, yaitu Muradov, Volkov dan Fedorenko yang disebutkan di atas, tidak proporsional dengan ukuran resmi kontingen penjaga perdamaian.

Menunjukkan bahwa Rusia memiliki ambisi yang lebih besar daripada hanya melakukan operasi pemeliharaan perdamaian yang relatif singkat dan kecil.<sup>5</sup> Kekuatan militer Rusia merupakan elemen penting dalam realisme khususnya ketika berbicara mengenai keamanan dan perang. Kekuatan militer, dalam paradigma realisme, merupakan alat yang digunakan oleh suatu negara dalam mencapai kepentingannya dan memanfaatkan lingkungan untuk mencapai kepentingannya.

#### **4.1.2. Tantangan Rusia Sebagai Penjaga Perdamaian**

Di bawah ketentuan perjanjian gencatan senjata, pasukan Armenia terpaksa meninggalkan Nagorno-Karabakh, dan mereka digantikan oleh kontingen penjaga perdamaian Rusia. Unit pertama penjaga perdamaian Rusia tiba di Armenia sudah pada awal November 2020 oleh angkutan udara melalui Georgia yang merupakan operasi pertama sejak perang 2008, sehingga mereka dapat mulai bergerak ke Azerbaijan sudah pada 10 November.

Sejak itu telah menjadi rahasia publik bahwa Rusia telah merencanakan untuk menyebarkan penjaga perdamaian sejak awal pertempuran, dan pertanyaannya sudah ada di agenda selama negosiasi tentang gencatan senjata pertama yang gagal 9-10 Oktober 2020.

---

<sup>5</sup> Anonim, "NAGORNO-KARABAKH: The Truth and Facts", MIAK (8 April 2011), [http://www.miak.am/pdf/NK\\_Long\\_Version.pdf](http://www.miak.am/pdf/NK_Long_Version.pdf) . Diakses pada 10 Februari 2022.

Akhirnya, Rusia berhasil melakukan pengerahan dalam gencatan senjata ketiga. Misi penjaga perdamaian non-tradisional Kontingen penjaga perdamaian Rusia tidak dapat dianggap sebagai operasi penjaga perdamaian tradisional logika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau OSCE<sup>6</sup>, karena ke sejumlah alasan.

Pertama dan terpenting, misi tersebut tidak memiliki mandat PBB atau OSCE, meskipun OSCE Minsk Group harus bertanggung jawab atas penyelesaian konflik. Sebaliknya, misi Rusia telah otorisasi hanya dari tiga pihak penandatanganan deklarasi gencatan senjata 9 November. Kedua, sementara prinsip-prinsip pemeliharaan perdamaian PBB menetapkan bahwa para pihak harus berkomitmen untuk proses politik, bahkan tidak ada proses politik seperti itu ada.<sup>7</sup>

Operasi penjaga perdamaian ini tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi segala jenis proses penyelesaian politik, satu-satunya misi yang ditetapkan secara resmi adalah untuk memantau perjanjian gencatan senjata.<sup>8</sup> Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, pasukan penjaga perdamaian Rusia pada awalnya akan tetap berada di Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan selama lima tahun. Mandat pertama ini secara otomatis akan diperpanjang lima tahun, kecuali salah satu pihak yang menandatangani keberatan untuk perpanjangan ini enam bulan sebelum berakhirnya periode saat ini.

---

<sup>6</sup> Lisbet. (2020). Konflik Armenia Dan Azerbaijan Serta Upaya Damai Masyarakat Internasional. Info Singkat, Vol. XII, No. 19, I/Puslit/Oktober/2020, 7-12.

<sup>7</sup> *Ibid* 36

<sup>8</sup> Welt, Cory and Andrew S. Bowen. (2021). Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict. Congressional Research Service.

Batas waktu tersebut menciptakan kondisi stabil untuk lima tahun pertama, dapat menyebabkan untuk ketidakstabilan dalam jangka panjang. Alasannya adalah ini pengaturan membuka kemungkinan bagi Azerbaijan untuk menolak perpanjangan misi penjaga perdamaian Rusia setelahnya November 2025, jadi di musim semi 2025. Setelah ini dimulai terjadi dan pasukan Rusia mundur, Azerbaijan pasukan mungkin bisa bergerak dengan relatif mudah, karena angkatan bersenjata Armenia harus meninggalkan wilayah itu sudah setelah November 2020.

Oleh karena itu, jika diterapkan perjanjian gencatan senjata ini memberi Azerbaijan kemungkinan untuk menyelesaikan penyatuan kembali wilayahnya dengan relatif mudah mulai November 2025 dan seterusnya. Kekhasan lain dari penjaga perdamaian Rusia Misinya adalah bahwa tidak seperti operasi tradisional yang dipimpin PBB atau OSCE, kontingen Rusia tidak memiliki mandat yang pasti, disepakati secara internasional dan tersedia untuk umum.

Sejauh itu dapat direkonstruksi dari sumber terbuka, poin tiga dan empat dari gencatan senjata perjanjian adalah satu-satunya peraturan hukum yang disepakati keduanya oleh Azerbaijan dan Armenia pada pasukan penjaga perdamaian Rusia, tetapi ini tidak mendefinisikan mandat yang tepat dari misi, maupun tugas, tanggung jawab, atau aturannya yang tepat keterikatan. Mereka juga tidak meresepkan bagaimana memastikan akuntabilitas misi, termasuk kepatuhan terhadap ketidakberpihakan yang diharapkan dari pemeliharaan perdamaian pasukan, atau bagaimana ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi.

Faktanya, pada akhir Maret 2021, satu-satunya peraturan yang disepakati oleh kedua pihak yang bertikai pihak dalam operasi penjaga perdamaian Rusia adalah beberapa garis pendek teks dalam perjanjian gencatan senjata. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menguraikan banyak tugas penting untuk misi penjaga perdamaian pada 20 November, termasuk kebutuhan untuk membantu pengungsi dan orang terlantar, dan berkontribusi pada pemulihan infrastruktur dan perlindungan situs keagamaan, instruksi ini bukan merupakan mandat yang disepakati secara internasional.<sup>9</sup>

Sebaliknya, Rusia Federasi tampaknya melakukan berbagai macam penjaga perdamaian dan tugas kemanusiaan di wilayah tersebut Nagorno-Karabakh dengan tingkat otonomi yang besar, tanpa dinyatakan secara eksplisit oleh salah satu pihak yang berperang. Sementara Armenia dan Rusia sudah memiliki perjanjian yang sah tentang tugas yang tepat dari operasi penjaga perdamaian, pada saat ini di waktu dokumen yang sesuai antara Rusia dan Azerbaijan belum ditandatangani.

Berbagai politisi Azerbaijan menjadi sangat gencar dalam kritik mereka terhadap tindakan penjaga perdamaian Rusia. Fakta bahwa penjaga perdamaian Rusia mempertahankan kontak dengan otoritas de facto Nagorno-Karabakh merupakan sumber tambahan keprihatinan politik untuk Azerbaijan, meskipun dari sudut pandang operasional kontak tersebut diperlukan.

---

<sup>9</sup> Nasrin Suleymanly, "An Analysis of the Nagorno-Karabakh Problem", Offset Co. Ltd Press (n.d): 87, [http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/enbooks/eb-en\\_05092012\\_07.pdf](http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/enbooks/eb-en_05092012_07.pdf) . Diakses pada 10 Februari 2022.

#### 4.2. Rusia Dalam Meningkatkan Stabilitas Pasca Konflik

Rusia sejak 2020 pasca konflik telah menggunakan perannya sebagai perantara di kawasan menunjukan pengaruh di Kaukasus Selatan. Rusia mempertahankan pengaruh besar di kawasan tersebut dan dapat dengan mudah memainkan perjanjian yang ditengahi UE. Pada 21 April 2022, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh Barat telah melumpuhkan peran Rusia dalam Grup Minsk dan mengutuk Uni Eropa telah merusak proses perdamaian.

Perjanjian damai yang mengamanatkan kompromi menimbulkan risiko serius bagi para pemimpin kedua negara. Namun ketidakstabilan di Ukraina mengubah dinamika di Kaukasus Selatan secara keseluruhan, kedua negara terpaksa untuk berbicara satu sama lain melalui format dan negosiator baru. Itu adalah risiko dan peluang potensial.<sup>10</sup> Tindakan Rusia terdorong oleh upaya meningkatkan kekuatan, keamanan, dan mencapai kepentingan nasional sesuai asumsi paradigma neo-realisme.

Putin berencana untuk memperluas Uni Ekonomi Eurasia, setara Rusia dengan Uni Eropa untuk negara-negara bekas Soviet, sementara Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dipandang terlalu dekat dengan Barat dan dapat menghambat ambisi itu. Sementara Rusia menjual senjata terhadap kedua pihak yang bertikai.

---

<sup>10</sup> Anonim, "NAGORNO-KARABAKH: The Truth and Facts", hlm 18.

Kepentingan ekonomi di kawasan Azerbaijan bergantung pada sumber daya alamnya, yaitu minyak dan gas, yang membuat kawasan ini sangat menarik bagi investasi asing.<sup>11</sup> Rusia secara de facto untuk mempertahankan kehadiran militernya di Azerbaijan merupakan bagian menjaga stabilitas di wilayah Nagorno-Karabakh pasca konflik bahkan setelah perjanjian itu berakhir pada tahun 2025. Sebagaimana dinyatakan di atas, mandat misi penjaga perdamaian Rusia secara otomatis diperpanjang setelah lima tahun untuk periode lima tahun lagi, kecuali salah satu pihak penandatanganan keberatan dengan ini.

Kecil kemungkinan Armenia akan keberatan, mengingat kehadiran kontingen Rusia tetap menjadi satu-satunya penjamin keamanan bagian Nagorno-Karabakh yang masih dikuasai Armenia. Sementara itu, Baku keberatan dengan perpanjangan misi Rusia, karena kepergian pasukan penjaga perdamaian kontingen akan membuka jalan bagi Azerbaijan untuk merebut kembali seluruh wilayah.

Pengalaman sejarah di wilayah pasca-Soviet menunjukkan bahwa begitu pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke suatu wilayah setelah konflik, mereka cenderung tidak pergi. Mereka tidak meninggalkan Moldova, juga tidak meninggalkan dua entitas separatis di Georgia. Dalam perjanjian gencatan senjata, berlaku juga untuk unit dan formasi Rusia lainnya yang telah dikerahkan ke Nagorno-Karabakh selain kontingen penjaga perdamaian resmi.

---

<sup>11</sup> MAR, "Chronology for Armenians in Azerbaijan", Minorities at Risk Project (16 Juli 2010) <http://www.cidcm.umd.edu/mar/chronology.asp?groupId=37301> . diakses pada 2 Maret 2022.

Abkhazia Nisasi tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, yaitu mengikuti pasteurisasi skala besar orang-orang Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh. Indikator lain dari kemungkinan skenario Abkhaz adalah fakta bahwa kepemimpinan Nagorno-Karabakh sedang mempertimbangkan untuk menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Armenia.

Dari perspektif hukum, pemerintah Azerbaijan selalu dapat beralih ke pengadilan, berdasarkan klaim kedaulatan Azerbaijan atas kantong itu, atau yang internasional. Namun, amandemen terbaru dibuat untuk konstitusi Rusia. Undang-undang pada tahun 2020 menetapkan supremasi hukum Rusia atas hukum internasional, jika keputusan organ internasional bertentangan dengan konstitusi Rusia sendiri.

#### **4.2.1. Stabilitas Pemukiman Teritorial**

Stabilitas pemukiman teritorial ditentukan oleh perjanjian gencatan senjata merupakan bagian penting dari keseluruhan keberlanjutan penyelesaian yang dicapai. Perjanjian tersebut menetapkan penghentian permusuhan berdasarkan status quo teritorial pada 9 November 2020, awalnya mengakibatkan beberapa situasi yang sangat tidak stabil, karena gencatan senjata datang segera berlaku. Sehingga memperkuat taktik situasi di lapangan, terlepas dari geografis, sosial, infrastruktur atau kondisi lainnya.

Terdapat tindakan yang sewenang-wenang seperti memotong jalan dan infrastruktur lainnya menjadi dua dapat menyebabkan beberapa masalah di masa depan, terutama mengenai rekonstruksi pasca konflik dan pembangunan kembali ekonomi. Kembalinya tujuh distrik yang diduduki sekitar Nagorno-Karabakh hingga kontrol Azerbaijan adalah menciptakan kesulitan juga di perbatasan lama yang sekarang dipulihkan antara Azerbaijan dan Armenia, sebagai perbatasan melintasi tidak hanya jalan tetapi juga beberapa desa.<sup>12</sup>

Meskipun pasukan Armenia diwajibkan untuk meninggalkan Karabakh, ini belum terjadi sepenuhnya bahkan pada akhir Januari 2021. Sementara Baku menafsirkan persyaratan ini sebagai semua pasukan militer Armenia perlu ditarik, menurut Yerevan dan kepemimpinan de facto di Karabakh kewajiban itu hanya berlaku bagi yang bersenjata pasukan Republik Armenia, sementara formasi bersenjata memproklamkan Republik Nagorno-Karabakh Republik bisa tinggal.

Sejauh ini Kontingen penjaga perdamaian Rusia tampaknya mendukung interpretasi kedua, meskipun kehadiran Armenia yang berkelanjutan formasi bersenjata dapat menyebabkan destabilisasi. Sejumlah bentrokan antara unit-unit separatis yang tersisa dan militer Azerbaijan telah terjadi. Insiden tingkat taktis masih terjadi terjadi pada tanggal 11 Desember 2021, ketika sekitar seratus militan Armenia menyerang tentara Azerbaijan di sekitar desa Chaylaggala/Khtsaber dan Kohna Taghlar/Hin Tagher.

---

<sup>12</sup> "Azerbaijan violated ceasefire about 16300 times in 2012", News.am (8 Januari 2013) <http://m.news.am/eng/news/135058.html> . diakses pada 2 Maret 2022.

Kedua desa tersebut terletak di distrik Khojavend, dan masih di bawah Armenia kontrol pada saat gencatan senjata, meskipun sudah dikepung oleh pasukan Azerbaijan. <sup>13</sup> Pertarungan akhirnya diakhiri oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia, yang untuk sementara menguasai kedua desa, sebelumnya menyerahkan pemukiman kepada pasukan Azerbaijan. Penjaga perdamaian Rusia ikut campur meskipun faktanya kedua desa berada di luar wilayah mandat mereka. Menunjukkan bahwa selama bahasa Armenia formasi bersenjata tidak sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata dan tetap aktif di daerah tersebut, ada risiko insiden kekerasan seperti itu berulang.

#### **4.2.2. Status Hukum Nagorno-Karabakh Pasca Konflik**

Perjanjian gencatan senjata tidak ada penyelesaian politik yang dilampirkan untuk status hukum. Negosiasi yang berlangsung terfokus tentang rincian teknis militer untuk mengakhiri permusuhan, termasuk pertukaran tahanan, melindungi warga sipil dan memastikan pelaksanaan yang tepat dari gencatan senjata. Sementara itu, tidak ada hasil dicapai mengenai masa depan politik Nagorno-Karabakh selama dikuasai Armenia. Selama beberapa putaran negosiasi gencatan senjata, pihak Armenia berusaha untuk memastikan bahwa Azerbaijan akan menjanjikan beberapa bentuk otonomi ke wilayah NKAO. <sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tevan Poghosyan, "The Armenian ENP and Conflict Resolution in Nagorno-Karabakh", Crisis Management Initiatives (September 2009): 17 [http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D7A2ABCC2B953F358525765000528218-Full\\_Report.pdf](http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D7A2ABCC2B953F358525765000528218-Full_Report.pdf) . diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>14</sup> Ibid

Posisi resmi Azerbaijan pasca konflik telah koheren dan kaku, semua wilayah masih dikendalikan oleh Armenia merupakan bagian integral dari wilayah Azerbaijan, sehingga Baku tidak tertarik memberikan segala bentuk budaya atau otonomi lainnya kepada populasi Armenia. Ini meninggalkan Karabakh Armenia tanpa realistik lainnya, baik dari sisi politik maupun sudut pandang eksistensial pilihan daripada mengandalkan keamanan yang disediakan oleh kontingen penjaga perdamaian Rusia.

Saat pasukan Armenia menderita kekalahan yang menghancurkan dalam perang, dari sudut pandang Karabakh sejak akhir pertempuran itu hanya kehadiran pasukan Rusia di dalam dan sekitar Nagorno-Karabakh yang mencegah Azerbaijan mengambil kembali semua wilayahnya. Dengan kata lain, dengan tidak adanya internasional didukung jaminan hukum dari Baku, kehadiran pasukan penjaga perdamaian Rusia merupakan satu-satunya jaminan Karabakh Armenia dapat diandalkan dalam melestarikan kenegaraan *de facto* mereka dan pemisahan dari Azerbaijan.

Hal ini juga mengakibatkan kepemimpinan Karabakh semakin condong ke arah Rusia. Paradigma realisme klasik sebagai kekuatan yang digunakan dalam interaksi antarnegara. Kekuatan dalam realisme sendiri merupakan suatu konsep yang dapat dipahami sebagai suatu kemampuan suatu negara dalam mempengaruhi aktor lain atau suatu peristiwa untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut.

#### 4.2.3. Pusat Gabungan Rusia – Turki

Pusat Gabungan Rusia-Turki untuk memantau gencatan senjata sementara Turki dikeluarkan dari perjanjian, Pusat Pemantauan Bersama Rusia-Turki didirikan pada Januari 2021. Rusia dan Turki sudah menyetujui pendirian pusat ini di 11 November 2020 dan mulai berfungsi pada 30 Januari 2021. Namun, pusat tidak mungkin bias untuk memberikan solusi penuh atas masalah akuntabilitas yang dijelaskan di atas.

Terutama, sementara penandatanganan perjanjian gencatan senjata adalah Armenia, Azerbaijan dan Rusia, bersama Turki-Rusia pusat pemantauan gencatan senjata hanya diizinkan oleh dua penandatanganan gencatan senjata, yaitu Azerbaijan dan Rusia. Armenia tidak memberikan persetujuannya, juga tidak diwakili dengan cara apa pun dalam struktur ini, meskipun pusat memiliki jalur komunikasi langsung ke militer dari semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Turki akan dapat melakukan pengawasan yang efisien melalui pusat ini. Dasar hukumnya tidak jelas, sementara Turki adalah bagian dari pusat pemantauan gencatan senjata, bukan penandatanganan gencatan senjata asli persetujuan. Oleh karena itu, dipertanyakan sejauh mana Turki akan mampu untuk melampaui pemantauan pasif gencatan senjata dan benar-benar memastikannya penerapan.

Kedua belah pihak mendelegasikan jenderal untuk memimpin pusat, Rusia yang diwakili oleh Mayor Jenderal Viktor Fedorenko, dan Turki oleh Mayor Jenderal Abdullah Katirci.

Meskipun teks kesepakatan tentang pusat pemantauan belum dibuat untuk dipublikasikan, prinsip kesetaraan ditunjukkan oleh komposisi personel dan sering ditekankan oleh para pemimpin politik Turki dan Rusia, menyarankan bahwa prinsip yang sama juga berlaku untuk pengambilan keputusan. Kalau tidak, satu sisi bisa mendominasi yang lain, dan posisi pihak yang lebih lemah jelas tidak dapat diterima baik oleh Ankara maupun Moskow.

Jika pengambilan keputusan benar-benar didasarkan pada konsensus, ini tidak menandakan efisiensi mekanisme pemantauan, jika terjadi perselisihan antara Turki dan Rusia tentang situasi di tanah, mungkin termasuk tindakan penjaga perdamaian Rusia juga. Sudah sering terlihat dalam konflik beku di wilayah pasca-Soviet bahwa Rusia siap menyalahgunakan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus struktur dengan menghalangi keputusan apa pun, sehingga secara efektif memperpanjang konflik, bukan menyelesaikannya.

Seperti situasi terjadi pada beberapa kesempatan ketika Rusia penjaga perdamaian dikerahkan ke Moldova dan Georgia, ke wilayah Transnistria, Abkhazia dan Selatan Ossetia, masing-masing. Oleh karena itu, jika pengambilan keputusan mekanisme Pusat Gabungan Rusia-Turki adalah berdasarkan konsensus, Turki menghadapi tantangan yang serupa dengan yang dihadapi oleh Moldova dan Para pemimpin Georgia, ketika mencoba untuk menegakkan kepatuhan kontingen penjaga perdamaian Rusia dengan perjanjian gencatan senjata. Jika insiden serupa dengan yang di Challagalla terjadi di masa depan, ini akan menjadi ujian penting untuk efisiensi nyata dari Pusat pemantauan Rusia-Turki.

### 4.3. Hubungan Rusia Dengan Negara Yang Terlibat Dalam Konflik

Konflik Nagorno-Karabakh masih tetap menjadi salah satu masalah yang paling mendesak dan tidak stabil di ruang pasca-Soviet. Meskipun dua perang ekspansif telah diperebutkan, bersama dengan satu dekade kekerasan hibrida dan intensitas rendah, konflik masih jauh dari penyelesaian, terlepas dari keterlibatan organisasi internasional atau upaya negara-negara mediator individu.<sup>15</sup>

Sementara pemain regional dan internasional memiliki kepentingan sendiri dalam penyelesaian konflik, ada satu aktor yang telah terlibat di Karabakh sejak abad ke-19 dan negara itu adalah Rusia. Saat ini, Rusia memiliki pengaruh yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi perkembangan di kawasan daripada aktor lain seperti UE dan AS, yang telah berusaha menemukan resolusi konflik sejak 1990-an.

Antara memiliki pasukan penjaga perdamaian di lapangan, menjadi penyedia keamanan utama bagi Armenia, dan baru-baru ini mengembangkan aliansi strategis dengan Azerbaijan, peran ekspansif Rusia dalam membentuk dan mempengaruhi fakta di lapangan tetap tak tertandingi. Lebih lanjut memperkuat pengaruh tertanam Rusia adalah dominasi barunya dari OSCE Minsk Group, yang telah diamankan Rusia sebelum perang tahun 2020 meletus.

---

<sup>15</sup> Hrach Tchilingrian, "Nagorno karabakh: transition and the elite", Central Asian Survey (1999), <http://oxbridgepartners.com/hratch/index.php/publications/journal-articles/58-nagorno-karabakh-transition-and-the-elit> . diakses pada 3 April 2022.

Rusia juga memperluas kekuatan lunaknya di Artsakh. Tahun lalu, bahasa Rusia diakui sebagai bahasa resmi di republik yang tidak diakui itu. Tentara Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Artsakh. Mereka mengunjungi taman kanak-kanak dengan mainan dan mengadakan seminar dan program pendidikan untuk anak-anak sekolah.

Secara kolektif, apa yang menyebabkan sikap Rusia ini di Artsakh, dan bagaimana kita bisa memenuhi syarat kepentingan Rusia dan tujuan strategis jangka panjang sehubungan dengan wilayah ini? Penting untuk memeriksa posisi kebijakan Rusia dan pergeseran jangka panjang ke arah konflik Nagorno-Karabakh karena masalah ini telah menjadi lebih bernuansa dan rumit selama beberapa dekade. Aliansi keduanya memiliki kepentingan yang selaras dengan negara lain. Selain hal tersebut, aliansi juga terbentuk bila negara-negara yang ada di dalamnya tidak memiliki konflik kepentingan yang mana bila hal tersebut terjadi, realisme berargumen bahwa negara-negara akan mementingkan kepentingannya sendiri (Basis 2018).

Bagi Rusia, Kaukasus Selatan secara konsisten dianggap sebagai wilayah yang sangat penting bagi keamanan nasionalnya. Pendekatan Rusia terhadap konflik Nagorno-Karabakh selalu sangat menyadari perkembangan mengenai Armenia, Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan, dengan lensa bersejarah yang berasal dari zaman kekaisaran. Rusia selalu merumuskan pendekatan terhadap penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh, dan selalu sepadan dengan Armenia dan Nagorno-Karabakh sebagai komponen penting dari sayap keamanan selatannya.

### 4.3.1. Hubungan Rusia – Armenia

Rusia digambarkan enggan untuk campur tangan secara terbuka dalam perang Nagorno-Karabakh 2020 untuk mendukung Armenia karena ketegangan yang sedang berlangsung antara Putin dan Pashinyan. Rusia akhirnya mengadakan pembicaraan damai antara Azerbaijan dan Armenia, yang berpuncak pada kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober, yang kemudian diabaikan oleh kedua belah pihak. Perang dihentikan ketika para pemimpin dan presiden Rusia yang berperang menandatangani perjanjian gencatan senjata di Moskow pada 9 November 2020.<sup>16</sup>

Pada Maret 2022, setelah dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, lebih dari 40.000 profesional dan pemrogram Rusia melarikan diri ke Yerevan. Setengah tinggal sebentar dan kemudian pindah. Sisanya membangun kembali diri mereka sendiri menggunakan koneksi internet yang membuat Armenia tetap terhubung dengan dunia sementara Rusia semakin terputus. Mereka dapat memasuki Armenia tanpa visa atau paspor dan tinggal selama enam bulan menggunakan bahasa Rusia secara bebas.

---

<sup>16</sup> Svante E. Cornell, "The Nagorno-Karabakh Conflict", Report no. 46, Department of East European Studies (1999) [http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe\\_derivate\\_00003079/Nagorno-Karabakh%20Conflict.pdf](http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003079/Nagorno-Karabakh%20Conflict.pdf) . diakses pada 25 Februari 2022.

#### 4.3.2. Hubungan Rusia – Azerbaijan

Rusia memiliki kedutaan besar di Baku, dan Azerbaijan memiliki kedutaan besar di Moskow dan konsulat jenderal di Saint Petersburg. Azerbaijan juga mengumumkan akan membuka konsulat jenderal lain di Yekaterinburg. Ada lebih dari setengah juta orang Azeri di Rusia serta diaspora Rusia yang terkenal di Azerbaijan, yang merupakan diaspora Rusia terbesar di wilayah tersebut. Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan bahwa rakyat Rusia dan Azerbaijan terikat dengan hubungan persahabatan dan kepercayaan yang paling dekat. Hubungan antara kedua negara tetap bersahabat dan dekat tetapi ada banyak perbedaan pendapat seperti dalam Perang Nagorno-Karabakh pertama, konflik Ossetia Selatan-Abkhazia, dan status hukum Laut Kaspia.

Azerbaijan mendukung Rusia dalam masalah Chechnya dan menutup kantor wakil presiden pemberontak Chechnya Aslan Maskhadov di Baku, karena mereka menghadapi kemungkinan gerakan separatis oleh Lezgins (Lezgistan). Beberapa analis berpendapat bahwa Rusia netral dan agak mendukung Azerbaijan dalam konflik Karabakh pada awal 1990-an sampai pemerintah nasionalis Elchibey menjabat, yang menyebabkan Rusia menandatangani banyak perjanjian militer dengan Armenia. Tindakan-tindakan tersebut, bersama dengan memori hitam pada Januari pada tahun 1990 selama pembubaran Uni Soviet, merupakan sumber ketidakpercayaan Rusia di masyarakat Azerbaijan, terutama di kalangan nasionalis. Menurut jajak pendapat yang diambil pada tahun 2007, sekitar 80% dari Azeri menyetujui persahabatan dengan Rusia.

Setelah perang 2008 dengan Georgia, jumlah ini turun menjadi 52%. Russophobia tidak pernah umum di Azerbaijan dan pemerintah juga berkomitmen kuat untuk melindungi hak-hak etnis Rusia di Azerbaijan, tetapi permusuhan ada terhadap orang Rusia yang menikah atau berhubungan dengan orang Armenia. Orang Azeri sering menghadapi diskriminasi di Rusia karena "Caucasophobia" umum yang muncul setelah Perang Chechnya, karena diyakini orang Rusia tidak dapat membedakan antara orang Azerbaijan dan kebangsaan Kaukasia lainnya.

Hubungan Pada awal Januari 2021, pihak berwenang Azerbaijan menuduh pasukan penjaga perdamaian Rusia menunjukkan sikap pro-Armenia, alih-alih mengambil sikap netral yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian damai. Beberapa praktik penjaga perdamaian Rusia tidak berkontribusi pada solusi permanen masalah Nagorno-Karabakh dan telah menyebabkan keraguan di Azerbaijan dan Turki tentang niat baik Rusia. Nazim Jafarsoy, wakil ketua Pusat Studi Strategis dan Hubungan Internasional Kaukasus menuduh pasukan penjaga perdamaian Rusia menyebabkan kelanjutan kehadiran pasukan militer ilegal di wilayah itu daripada memberikan perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan.

Pertemuan dengan tokoh-tokoh senior Artsakh, dan kehadiran bendera Artsakh pada pertemuan Muradov telah menghasilkan reaksi negatif dari otoritas Azerbaijan, sementara penggunaan frasa "Republik Nagorno-Karabakh" telah dihapus dari situs resmi Kementerian Rusia . Pertahanan setelah keberatan Azerbaijan tidak mengizinkan kunjungan warga asing mana pun ke Nagorno-Karabakh tanpa izinnya.

### 4.3.3. Hubungan Rusia – Turki

Hubungan Rusia dengan Turki adalah hubungan bilateral antara Rusia dan Turki dan negara-negara pendahulunya. Hubungan antara keduanya agak siklus. Dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-20, hubungan antara kekaisaran Ottoman dan Rusia biasanya merugikan dan bermusuhan dan kedua kekuatan itu terlibat dalam banyak perang Rusia-Turki, yang merupakan salah satu perang terpanjang dalam sejarah modern. Rusia berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Balkan dan menguasai Bosphorus dengan mengorbankan Kekaisaran Ottoman yang melemah.

Akibatnya, sejarah diplomatik antara kedua kekuatan sangat pahit dan sengit hingga Perang Dunia I. Namun, pada awal 1920-an, sebagai akibat dari bantuan pemerintah Rusia Bolshevik kepada kaum revolusioner Turki selama Perang Kemerdekaan Turki, pemerintah hubungan menghangat. Hubungan kembali memburuk pada akhir Perang Dunia II ketika pemerintah Soviet mengajukan klaim teritorial dan menuntut konsesi lain dari Turki.

Turki bergabung dengan NATO pada tahun 1952 dan menempatkan dirinya dalam aliansi Barat melawan Pakta Warsawa selama Perang Dingin, ketika hubungan antara kedua negara berada pada tingkat terendah. Hubungan mulai membaik pada tahun berikutnya, ketika Uni Soviet melepaskan klaim teritorialnya setelah kematian Stalin.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Pristiandaru, Danur Lambang. (2020). Perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh dan Senjata yang Dipakai. Dipetik pada 9 March 2022 dari

Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, hubungan antara Turki dan Rusia meningkat secara signifikan dan kedua negara menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain. Rusia menjadi penyedia energi terbesar Turki, sementara banyak perusahaan Turki mulai beroperasi di Rusia. Pada 1990-an, Turki menjadi tujuan asing utama bagi turis Rusia.

Namun, kedua negara masih berdiri di ujung yang berlawanan dalam hal kepentingan kebijakan luar negeri, terutama dalam isu-isu tegang seperti konflik Nagorno-Karabakh, Perang Saudara Suriah, Perang Saudara Libya, konflik Kosovo dan memiliki pandangan yang berlawanan tentang genosida Armenia. Hubungan tegang setelah penembakan jet tempur Rusia pada November 2015, menjadi normal kembali pada 2016.

Sebagai mitra dekat Rusia dan Ukraina, Turki secara aktif berusaha menengahi solusi damai untuk invasi Rusia 2022 ke Ukraina, dan telah menjadi tuan rumah pertemuan sejumlah negosiasi tingkat tinggi antara kedua negara. Kepentingan geostrategis Rusia dan Turki di kawasan itu banyak dikomentari selama perang. Keduanya digambarkan mendapat manfaat dari perjanjian gencatan senjata, Rusia dan Turki, pihak yang mendapat keuntungan secara ekonomi.

---

<https://www.kompas.com/global/read/2020/12/12/140000970/-kaleidoskop-2020-perang-armenia-azerbaijan-di-nagorno-karabakh-dan?page=all.from>

Pada akhir Oktober, serangan udara Rusia menargetkan sebuah kamp pelatihan untuk Failaq al-Sham, salah satu kelompok pemberontak Islam Sunni terbesar yang didukung Turki di provinsi Idlib Suriah, menewaskan 78 gerilyawan dalam tindakan yang secara luas ditafsirkan sebagai tembakan peringatan ke Ankara atas keterlibatan terakhir di Nagorno- Pertempuran Karabakh. Argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh paradigma realisme dalam Hubungan Internasional relevan dengan keterlibatan Turki dalam konflik tersebut bila mengingat semua aktor menggunakan kekuatan untuk mencapai kepentingannya, dan bahwa negara dapat membangun aliansi dalam mencapai kepentingannya.

#### **4.4. Sikap Rusia Terkait Dampak Pasca Konflik**

Peran Rusia sebagai hegemoni regional karena berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan kedua negara bekas Soviet bahkan pasca konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Rusia yang kuat dalam mencegah perang yang berkesempatan mengubah status quo regional. Mempertahankan status quo yang menguntungkan dengan logika strategis adalah kepentingan keamanan utama dari hegemoni regional seperti Rusia. Risiko di Kaukasus yang bergejolak menghadirkan ancaman keamanan lain bagi Rusia.

Perang telah mengubah keseimbangan kepentingan di kawasan yang tidak menguntungkan bagi Rusia menciptakan celah untuk intervensi regional oleh Turki. Dalam konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, terdapat peran serta Turki dan Rusia untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya.

Turki mendukung Azerbaijan dikarenakan mereka memiliki hubungan yang baik dalam hal politik, budaya dan bahasa. Selain itu, hubungan yang renggang antara Turki dan Armenia membuka celah bagi Turki untuk menekan Armenia melalui dukungan terhadap Azerbaijan. Di sisi lain, Rusia memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan dalam menjamin keamanan bagi Armenia dan juga sebagai mitra ekonomi.

#### **4.4.1. Keterlibatan Turki Dalam Proses Perdamaian**

Rusia dan Turki memainkan peran atas proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh. Dalam hal ini, Rusia berhasil mengakhiri konflik ini dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020 (President of Russia, 2020). Kemudian, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan juga melakukan kesepakatan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pada 10 November 2020 (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020b).<sup>18</sup>

Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembentukan pusat tersebut oleh Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada 11 November 2020 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020).

---

<sup>18</sup> Guner Ozkan, "Rising Tension in the Caucasus", International Strategic Research Organization (n.d), <http://www.usak.org.tr/EN/myazdir.asp?id=1699> . diakses pada 1 April 2022.

Manajemen pengawasan dari pusat ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdullah Katirci dari pihak Turki dan dari pihak Rusia dipimpin oleh Mayor Jenderal Viktor Fedorenko (Rácz, 2021). Masing-masing militer Turki dan Rusia yang bekerja menggunakan pesawat tanpa awak (drone). Pusat Gabungan Turki-Rusia ialah untuk mengawasi perjanjian gencatan 9 November 2020. Penting untuk digarisbawahi bahwa Turki secara perdana terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh bersama Rusia di Pusat Gabungan Turki-Rusia.

Determinan Turki melakukan kerja sama dengan Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh berdasarkan beberapa fakta. Presiden Erdogan ingin berpartisipasi dalam proses perdamaian bagi Azerbaijan dan Armenia dengan memberi pengaruh bagi Azerbaijan sekaligus menjadi kekuatan regional di wilayah Kaukasus Selatan. Turki juga memiliki ketergantungan ekonomi dan militer kepada Rusia dan co-chairs OSCE Minsk Group yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh.

Oleh karena itu, Turki melakukan kesepakatan kepada Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia karena adanya ketergantungan Turki terhadap Rusia dan ketidakefektifan co-chairs OSCE Minsk Group, serta pengaruh doktrin politik luar negeri Turki yang kemudian mendorong Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengambil peran strategis bersama Rusia guna menjadi perantara proses perdamaian bagi Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh.

Rusia juga harus bersaing dengan meningkatnya pengaruh Turki, yang dorongan dan dukungannya terhadap Baku di medan perang sangat penting dalam keberhasilan militernya, dan menjadikannya pemain kunci di wilayah yang dianggap Moskow sebagai halaman belakang. Azerbaijan telah berulang kali meminta tentara Turki untuk juga bertindak sebagai penjaga perdamaian, tetapi Kremlin mengatakan tidak ada peran bagi mereka di bawah ketentuan gencatan senjata.

Meskipun demikian, parlemen Turki memberikan izin kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengirim pasukan ke Azerbaijan untuk bertugas bersama pejabat militer Rusia di pusat pemantauan gencatan senjata. Mosi yang diajukan oleh pemerintah mengatakan penempatan itu akan bermanfaat bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu dan diperlukan dari sudut kepentingan nasional Turki.

#### **4.4.2. Perubahan Politik Antara Azerbaijan Dan Armenia**

Rusia dalam mengatasi masalah keamanan dan transit karena tidak adanya penyelesaian politik yang lebih luas yang mampu mengubah hubungan Armenia-Azerbaijan. Tanpa adanya perubahan politik, orang-orang Armenia dan Azerbaijan tidak akan bisa hidup berdekatan satu sama lain tanpa melihat satu sama lain sebagai ancaman. Rusia sepakat menganggap keamanan sejati datang dari perubahan politik, bukan penjaga perdamaian.

Berdasarkan kesepakatan bersama, harus ditangani dengan pengaturan keamanan internasional untuk menjaminkannya. Sebuah peta jalan yang mungkin menuju penyelesaian yang seimbang dikembangkan satu dekade lalu dalam Prinsip-Prinsip Dasar, yang menguraikan prinsip-prinsip penyelesaian, termasuk pengembalian wilayah-wilayah di sekitar Nagorno-Karabakh ke kendali Azerbaijan, status sementara untuk Nagorno-Karabakh yang memberikan jaminan keamanan dan pemerintahan sendiri koridor yang menghubungkan Armenia ke Nagorno-Karabakh.

Penentuan masa depan status akhir Nagorno-Karabakh melalui ekspresi kehendak yang mengikat secara hukum, hak pemulangan Pengungsi dan Pengungsi, dan jaminan keamanan internasional, termasuk operasi penjaga perdamaian. Kepemimpinan de facto juga mengubah arah di bidang politik, mengesampingkan seruan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatan parlemen sebuah langkah yang akan membuat konstitusi Nagorno-Karabakh lebih sejalan dengan konstitusi Armenia. Para pemimpin Nagorno-Karabakh membenarkan keputusan tersebut, dengan alasan model parlementer tidak lagi sesuai mengingat meningkatnya ancaman perang.

Sebaliknya, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang diamandemen yang secara efektif memperkuat otoritas presiden. Ini juga memungkinkan presiden de facto saat ini, Bako Sahakyan, untuk tetap berkuasa selama masa transisi tiga tahun setelah masa jabatan keduanya berakhir pada Juli 2017 dan mencalonkan diri lagi pada 2020.

Lebih dari 90 persen pemilih menyetujui pemilihan tersebut, amandemen dalam referendum Februari 2017. Hanya satu politisi oposisi yang berkampanye menentang perubahan konstitusi, termasuk beberapa di dalam pemerintahan de facto menentang secara pribadi. Memilih untuk tidak menyuarakan keprihatinan mereka di tengah kekhawatiran akan serangan baru dari Azerbaijan.

#### **4.5. Perspektif Rusia Terkait Potensi Penyelesaian Konflik**

Seperti perselisihan lain yang dipicu oleh kesenjangan kekuasaan yang diciptakan oleh pembubaran Uni Soviet, masalah Karabakh juga berubah menjadi konflik antara para pihak di awal 1990-an. Namun, seperti yang diamati dalam konflik lain, perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani setelah konfrontasi militer menciptakan lingkungan di mana tidak ada perang atau perdamaian, sehingga menyebabkan konflik ini diberi label konflik beku.

Seperti zona konflik beku lainnya di bekas geografi Soviet, konflik Karabakh diperkirakan tidak akan mampu bertahan dalam spiral negosiasi konflik untuk waktu yang lama. Perang yang berakhir pada November 2020 telah membawa langkah penting menuju penyelesaian masalah, meski tidak sepenuhnya. Ini merupakan indikasi bahwa telah mengambil jalan yang berbeda dibandingkan dengan zona konflik beku lainnya dalam menyelesaikan konflik Karabakh.

Alasan paling penting untuk menempuh jalan seperti itu dalam konflik ini dapat dijelaskan, seperti semua zona konflik beku lainnya, oleh kegagalan proses negosiasi setelah konfrontasi militer di awal 1990-an. Kegagalan ini menyebabkan sekuritisasi masalah oleh kedua belah pihak berulang kali.

Membuka jalan bagi konfrontasi akhirnya. Dapat dikatakan bahwa negara-negara yang melakukan negosiasi lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada dinamika internal masalah, serta keengganan para pihak, memainkan peran penting. Mobilisasi langkah-langkah luar biasa untuk konfrontasi militer terakhir, yang dipicu oleh dinamika sekuritisasi yang diciptakan oleh kebuntuan, memicu bentrokan. Dengan kata lain, kegagalan proses negosiasi dianggap membuka jalan bagi konfrontasi militer dengan sangat menghilangkan kemungkinan desekuritisasi masalah.

Hal ini mengingatkan kemungkinan bahwa hal serupa akan terjadi di daerah konflik beku lainnya. Dengan kata lain, pihak-pihak lain yang berkonflik beku, bergerak dari contoh Karabakh, menyelesaikan masalah mereka dengan mengambil tindakan luar biasa seperti penggunaan kekuatan militer melalui sekuritisasi masalah mereka. Namun, hal ini dapat menyebabkan meluasnya penggunaan kekerasan di wilayah-wilayah tersebut dan semakin meningkatkan ketidakstabilan regional.

#### **4.5.1. Rusia Memfasilitasi Penyelesaian Akhir**

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencoba memfasilitasi penyelesaian akhir, yang akan mencegah meletusnya konflik yang tidak menguntungkan di Kaukasus Selatan. Rusia melakukan berbagai tugas pemeliharaan perdamaian dan kemanusiaan di Nagorno-Karabakh dengan otonomi yang luas.

Faktanya, pada akhir Maret 2021, satu-satunya peraturan yang disepakati oleh kedua pihak yang bertikai tentang operasi penjaga perdamaian Rusia adalah beberapa baris pendek teks dalam perjanjian gencatan senjata. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menguraikan banyak tugas penting untuk misi penjaga perdamaian.

Pada tanggal 20 November, termasuk kebutuhan untuk membantu pengungsi dan orang terlantar, dan berkontribusi pada pemulihan infrastruktur dan perlindungan situs keagamaan, instruksi ini bukan merupakan mandat yang disepakati secara internasional. Sebaliknya, Federasi Rusia tampaknya melakukan berbagai tugas pemeliharaan perdamaian dan kemanusiaan di wilayah Nagorno-Karabakh dengan tingkat otonomi yang besar, tampaknya tanpa secara eksplisit dinyatakan oleh salah satu pihak yang bertikai.

Sementara Armenia dan Rusia telah memiliki kesepakatan yang sah tentang tugas yang tepat dari operasi penjaga perdamaian, pada saat ini dokumen yang sesuai antara Rusia dan Azerbaijan belum ditandatangani. Berbagai politisi Azerbaijan menjadi sangat gencar dalam kritik mereka terhadap tindakan penjaga perdamaian Rusia setelah insiden Challağalla dan serbuan tentara Rusia ke wilayah yang dikuasai Azerbaijan. Fakta bahwa penjaga perdamaian Rusia mempertahankan kontak dengan otoritas de facto Nagorno-Karabakh adalah sumber perhatian politik tambahan untuk Azerbaijan, meskipun dari sudut pandang operasional, kontak semacam itu diperlukan.

#### 4.5.2. Rusia Mempromosikan Konektivitas Ekonomi Regional

Melalui Rusia, ketergantungan Armenia terhadap kemitraan militernya dengan Rusia untuk memastikan keamanan di perbatasannya pasca konflik. Partisipasi dalam Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan jaminan perlindungan tambahan. Pasal 4 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa agresi terhadap salah satu anggotanya dianggap sebagai serangan terhadap semua negara yang terikat oleh perjanjian tersebut.

Jika strategi pertahanan kolektif kemudian dapat dipertimbangkan, harus ditekankan bahwa Armenia tidak dapat mengambil manfaat dari klausul pertahanan timbal balik apapun selama perang 44 hari, karena Nagorno-Karabakh tidak diakui sebagai milik wilayah Armenia. Armenia memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan CSTO.

Rusia menyediakan operasi penjaga perdamaian di perbatasan dan di Nagorno-Karabakh, yang membayangkan perpanjangannya melampaui tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas diplomatik multiarah yang dikembangkan oleh Armenia menunjukkan adanya usaha menyeimbangkan hubungan luar negerinya. Rusia sekarang dapat membuka jalan bagi supremasi energinya sendiri dengan menciptakan hambatan bagi Azerbaijan untuk mengejar tujuannya memasok Eropa dengan gasnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ian J. McGinnity, "Selling its Future Short: Armenia's Economic and Security Relations with Russia", CMC Senior Theses (2010): 4 & 15, [http://scholarship.claremont.edu/cmc\\_theses/58](http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/58) . Diakses pada 26 Maret 2022